

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, dan HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka adalah kegiatan pendalaman terhadap materi-materi yang berkaitan dengan objek penelitian yang sedang di kaji. Materi-materi tersebut dapat berasal dari buku, jurnal, artikel, ataupun hal lain yang relevan dengan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

Penulis akan membagi tinjauan pustaka ini menjadi tiga bagian, bagian pertama peneliti akan menjelaskan landasan atau konsep dasar tentang objek penelitian, diantaranya yaitu konsep dasar mengenai kesejahteraan masyarakat, *public goods*, investasi, pertumbuhan ekonomi, dan kesempatan kerja. Pada bagian ini pula akan dipaparkan tentang beberapa temuan penelitian yang relevan dengan objek penelitian.

Bagian kedua berisi kerangka pemikiran yang merupakan bagian terpenting dan dasar dalam penelitian sehingga akhirnya akan menghasilkan hipotesis dan kesimpulan yang baik. Kerangka pemikiran membantu mengembangkan penelitian berdasarkan teori atau dalil yang relevan dengan masalah yang diteliti. Dalam bagian ini juga dijelaskan sejumlah konsep, dasar teoritis, dan tinjauan hasil penelitian terdahulu yang serupa dengan penelitian ini,

Pada akhir bab ini penulis akan memaparkan tentang hipotesis, yang menjadi dasar untuk memecahkan masalah penelitian. Pengujian hipotesis digunakan sebagai dasar dari identifikasi hasil temuan penelitian. Adapun pengujian hipotesis dalam penelitian ini adalah *path analisis* yang nantinya akan dilakukan uji sobel

untuk mengetahui pengaruh *public goods*, investasi, pertumbuhan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat melalui kesempatan kerja Indonesia tahun 2007-2021.

Pembangunan Manusia

Jika permasalahan besar yang ada di masyarakat dapat teratasi itu berarti pembangunan yang dilaksanakan berhasil. Permasalahan besar dan dasar tersebut diantaranya kemiskinan, pengangguran, buta huruf, ketahanan pangan, dan penegakan demokrasi. Todaro dan Smith Stephen C (dalam Mulia & Saputra, 2020) mengatakan bahwa belum adanya ukuran capaian keberhasilan dari pembangunan manusia secara keseluruhan. Pembangunan manusia adalah konsep yang tepat dengan pembangunan berkelanjutan. Kedudukan manusia sebagai makhluk primer merupakan sarana utama dalam pembangunan. Menurut Ranis dan Stewart (dalam Mulia & Saputra, 2020) terdapat 12 kategori dalam pembangunan manusia yaitu sebagai berikut: Indeks Pembangunan Manusia (IPM), kesejahteraan mental, pemberdayaan, kebebasan berpolitik, hubungan sosial, kesejahteraan masyarakat, ketimpangan, kondisi kerja, kondisi reaksi, politik dan keamanan, keamanan ekonomi, dan kondisi lingkungan.

United Nations Development Programme (UNDP) menjelaskan bahwa pembangunan manusia merupakan perluasan pilihan bagi penduduk (*enlarging the choices of people*) yang dapat dilihat sebagai proses menuju arah “perluasan pilihan”. Pembangunan manusia juga dapat dilihat sebagai pembangunan (*formation*), kemampuan manusia melalui perbaikan taraf kesehatan, pengetahuan, keterampilan, serta sebagai memanfaatkan (*utilization*) kemampuan atau

keterampilan mereka. Konsep pembangunan tersebut tentu lebih luas dibandingkan konsep pembangunan ekonomi yang hanya menekankan pada pertumbuhan ekonomi, kebutuhan dasar, kesejahteraan masyarakat.

Kapabilitas, kreatifitas, dan produktifitas masyarakat harus meningkat sehingga mereka menjadi agen pertumbuhan. Pertumbuhan ekonomi harus dikombinasikan dengan kesetaraan distribusi manfaat dan kesempatan yang tersedia untuk generasi masa depan. Menurut UNDP dalam *Human Development Report* (HDR) tahun 1995 terdapat empat elemen penting dalam konsep. (*Human Development Report 1995*, 1995) yaitu sebagai berikut:

a. Produktivitas (*Productivity*)

Masyarakat harus bersedia meningkatkan produktivitasnya dan berpartisipasi sepenuhnya dalam proses mencari penghasilan dan lapangan pekerjaan. Oleh karena itu, pembangunan manusia merupakan bagian dari pembangunan ekonomi.

b. Pemerataan (*Equity*)

Masyarakat harus memiliki akses kesempatan yang sama. Berbagai hambatan, terutama ekonomi dan politik harus dihapuskan sehingga masyarakat dapat berpartisipasi dalam peluang-peluang yang ada.

c. Kestinambungan (*Sustainability*)

Perlu adanya kepastian akses terhadap peluang bukan hanya untuk generasi sekarang tapi juga untuk generasi di masa yang akan datang. Segala bentuk modal fisik, manusia, lingkungan dan hal lain harus disiapkan.

d. Pemberdayaan (*Empowerment*)

Pembangunan dilakukan bukan hanya untuk kepentingan segelintir orang namun di dalamnya harus terdapat partisipasi masyarakat penuh dalam keputusan dan proses hidup mereka.

2.1.1 Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan yang merupakan kata turunan dari sejahtera. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sejahtera berarti aman sentosa dan makmur atau selamat dari segala macam gangguan. Menurut Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial mengatakan bahwa kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Pressman (dalam Tampubolon, 2016) mengatakan bahwa masyarakat sejahtera ditandai dengan masyarakat dapat membaca, makan, dan memberikan hal suara sehingga masyarakat memiliki banyak pilihan dan bebas memilih dari pilihan-pilihan tersebut. Kesejahteraan masyarakat membutuhkan kerjasama yang baik dan berkesinambungan antara pemerintah dan swasta. Kata Kesejahteraan juga tercermin dalam Pancasila pada sila kelima “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia” hal tersebut berarti pemerintah harus memberikan tanggung jawab kesejahteraan terhadap masyarakat. Tujuan negara yang terdapat dalam UU Negara Republik Indonesia tahun 1945 salah satunya juga bertujuan untuk mencapai kesejahteraan. Menurut Paul Hogget (dalam Tussa'diah, 2019) memberikan tiga

dimensi menuju masyarakat kesejahteraan sosial atau yang disebut dengan “*good society*”:

1. *Welfare Consumerism*

Dalam dimensi ini kesejahteraan hidup atau (*well being*) ditentukan dan diukur oleh kemampuan orang untuk mendapatkan kuantitas dan variasi barang material dan pelayanan sosial. Semuanya dihitung dengan konsep uang, sehingga barang dan pelayanan sosial yang tersedia bisa dinikmati dan dibeli oleh masyarakat

2. *Welfare Statism*

Kesejahteraan hidup (*well being*) masyarakat ditentukan atau diukur dengan tersedianya barang dan pelayanan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar tanpa adanya variasi pilihan yang beragam. Semua barang dan pelayanan didapatkan oleh orang-orang yang berhak.

3. *Ecowelfarism*

Kesejahteraan hidup (*well being*) masyarakat ditentukan atau diukur berdasarkan kemampuan masyarakat untuk memenuhi kesempatan kebutuhan dasar dengan kekuatannya sendiri. Pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan daya dukung lingkungan hidupnya.

Nasikun (dalam Mulia & Saputra, 2020) konsep kesejahteraan dapat dirumuskan sebagai padanan makna yang terdiri dari empat indikator, yaitu: rasa aman (*security*), kesejahteraan (*welfare*), kebebasan (*freedom*), dan jati diri (*identity*). Menurut Malthus mengatakan bahwa peningkatan kesejahteraan suatu negara bergantung pada kuantitas produk yang dihasilkan oleh tenaga kerjanya, dan

Sebagian lagi pada nilai atas produk tersebut. Tetapi, kesejahteraan sesuatu negara tidak selalu meningkat dalam proporsi yang sama dengan peningkatan pada nilai; peningkatan pada nilai kadangkala bisa terjadi atas dasar penyusutan aktual pada komoditi (Jhingan, 2013: 97).

John Stuart Mill mengatakan bahwa peningkatan kesejahteraan mungkin terjadi jika tanah dan modal mampu meningkatkan produksi lebih cepat dibanding angkatan kerja. Kesejahteraan sendiri terdiri atas peralatan, mesin, dan keterampilan angkatan kerja. Tenaga kerja produktif inilah yang merupakan pencipta kesejahteraan dan akumulasi modal. Laju akumulasi modal merupakan fungsi dari bagian angkatan kerja yang diperkerjakan secara produktif. Laba yang diterima dengan memperkerjakan tenaga kerja tidak produktif hanyalah semata-mata pengalihan pendapatan; tenaga kerja tidak produktif tidak menghasilkan kesejahteraan ataupun pendapatan. Hanya tenaga kerja produktif, yang dapat melakukan konsumsi produktif. Konsumsi produktif adalah konsumsi untuk memelihara dan meningkatkan kemampuan produktif masyarakat. Hal tersebut menunjukkan bahwa konsumsi produktif merupakan output yang diperlukan untuk memelihara tenaga kerja produktif (Jhingan, 2013:105-106).

2.1.1.1 Indikator Kesejahteraan Masyarakat

Untuk melihat sejauh mana keberhasilan pembangunan dan kesejahteraan manusia, *United Nation Development Programme* (UNDP) pada tahun 1990 telah menerbitkan suatu indikator atau alat ukur yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM adalah acuan untuk mengukur kesuksesan kesejahteraan dan pembangunan di suatu negara serta dapat juga digunakan untuk menentukan apakah

negara tersebut termasuk negara berkembang atau negara yang maju. Menurut BPS IPM adalah sesuatu yang menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya.

IPM sebagai indikator perkembangan pembangunan manusia yang terukur dan representatif. Angka IPM berkisar antara 0 hingga 100. Semakin mendekati 100, hal tersebut mengindikasikan bahwa terjadi pembangunan manusia atau kesejahteraan yang semakin baik. Berdasarkan konsep pembangunan manusia yang dikembangkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menetapkan kategori pembangunan manusia pada skala 0.0 sampai dengan 100,0 dengan kategori sebagai berikut:

- a. Tinggi (*Very High Human Development*) : IPM lebih dari 80,0
- b. Menengah Atas (*High Human Development*) : IPM antara 79,9 – 66,0
- c. Menengah Bawah (*Medium Human Development*) : IPM antara 65,9 – 50,0
- d. Rendah (*Low Human Development*) : IPM kurang dari 50,0

IPM terbentuk dari tiga dimensi yaitu: Dimensi umur panjang dan sehat di diukur dengan angka harapan hidup pada waktu lahir (*life expectancy at birth*), dimensi pendidikan diukur dengan gabungan antara angka melek huruf (*literacy rate*), dan rata-rata lama sekolah (*mean years of schooling*), dan dimensi kehidupan layak diukur dengan kemampuan daya beli (*purchasing power parity*) (BPS dalam Mulia & Saputra, 2020). Ketiga indikator tersebut saling memiliki keterkaitan satu dengan yang lain, dan dapat dipengaruhi dengan faktor yang lain seperti ketersediaan kesempatan kerja yang ditentukan oleh infrastruktur, pertumbuhan

ekonomi, dan kebijakan pemerintah. Peningkatan IPM terjadi jika terdapat peningkatan juga di ketiga unsur tersebut.

Menurut BPS metode perhitungan IPM mengalami perubahan dari metode lama menjadi metode baru semenjak tahun 2010. Perubahan tersebut dikarenakan terdapat beberapa indikator yang sudah tidak relevan. Dimensi pendidikan mengalami perubahan pada indikator Angka Melek Huruf menjadi Angka Harapan Lama Sekolah dan dimensi kemampuan daya beli atau pendapatan mengalami perubahan pada indikator Produk Domestik Bruto (PDB) menjadi Produk Nasional Bruto (PNB). Adapun dalam penelitian ini perhitungan IPM sudah menggunakan data IPM dengan perhitungan metode baru yang terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

a. Indeks Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup (AHH) adalah rata-rata banyaknya tahun yang dapat ditempuh seseorang selama hidup. Jenis data yang digunakan adalah Anak Lahir Hidup (ALH) dan Anak Masih Hidup (AMH). Indeks harapan hidup mengacu pada nilai maksimum dan nilai minimum yang ditetapkan oleh UNDP, angka tertinggi batas perhitungan indeks harapan hidup yang digunakan adalah 85 tahun dan terendah adalah 25 tahun. Menurut BPS perhitungan indeks kesehatan sebagai berikut:

$$I_{\text{kesehatan}} = \frac{UHH - UHH_{\text{min}}}{UHH_{\text{maks}} - UHH_{\text{min}}}$$

b. Indeks Pendidikan

Dimensi pengetahuan dalam IPM diukur dengan tingkat pendidikan. Indikator yang digunakan adalah harapan lama sekolah dan rata-rata lama

sekolah. Rata-rata lama sekolah menggambarkan jumlah tahun penduduk usia 15 tahun ke atas dalam menjalankan pendidikan formal. Rata-rata lama sekolah memiliki batas maksimum 15 tahun dan minimum selama 0 tahun. Angka melek huruf adalah persentasi penduduk usia 15 tahun keatas yang mampu untuk membaca dan menulis huruf latin dan huruf lainnya. Batas maksimum angka melek huruf adalah 100 (seratus) dan minimum 0 (nol). Nilai 100 (seratus) menggambarkan masyarakat dalam kondisi 100 persen mampu membaca dan menulis, sedangkan nilai 0 (nol) menggambarkan kondisi sebaliknya. Perhitungan indeks pendidikan menurut BPS adalah sebagai berikut:

$$IHLS = \frac{HLS - HLS_{min}}{HLS_{maks} - HLS_{min}}$$

$$IRLS = \frac{RLS - RLS_{min}}{RLS_{maks} - RLS_{min}}$$

$$I_{pendidikan} = \frac{IHLS + IRLS}{2}$$

c. Indeks Standar Hidup Layak

UNDP mengukur standar hidup layak menggunakan PNB rill yang disesuaikan, sedangkan BPS menggunakan rata-rata pengeluaran per kapita ril yang disesuaikan. Adapun perhitungan indeks standar hidup layak menurut BPS sebagai berikut:

$$I_{pengeluaran} = \frac{\ln(\text{Pengeluaran}) - \ln(\text{Pengeluaran min})}{\ln(\text{Pengeluaran maks}) - \ln(\text{Pengeluaran min})}$$

Sehingga IPM sebagai rata-rata geometrik dari indeks kesehatan, pendidikan, dan pengeluaran dapat diitung dengan cara sebagai berikut:

$$IPM = \sqrt[3]{I_{kesehatan} \times I_{pendidikan} \times I_{pengeluaran}}$$

2.1.2 Kesempatan Kerja

Sumber daya manusia sama pentingnya dengan sumberdaya alam yang terdapat di negara tersebut. Adam Smith mengatakan bahwa sumberdaya manusia merupakan faktor terpenting dalam pertumbuhan ekonomi (Jhingan, 2013: 75). Hal tersebut juga harus disertai dengan penekanan efisiensi sumberdaya manusia itu sendiri. Secara garis besar, penduduk dari suatu negara dibedakan menjadi dua golongan yaitu, golongan tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Golongan tenaga kerja adalah mereka penduduk yang sudah memasuki usia kerja, dan sebaliknya golongan bukan tenaga kerja adalah penduduk yang belum memasuki usia kerja.

Menurut BPS tenaga kerja adalah penduduk dengan usia 15 tahun keatas dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu Angkatan kerja dan Bukan Angkatan kerja. Kelompok Angkatan kerja adalah penduduk usia 15 tahun keatas yang sedang bekerja atau mempunyai pekerjaan tapi untuk sementara waktu tidak bekerja dan yang sedang mencari pekerjaan. Sedangkan, kelompok Bukan Angkatan kerja adalah penduduk usia 15 tahun keatas yang tidak bekerja, tidak mempunyai pekerjaan dan tidak sedang mencari pekerjaan, seperti pelajar dan ibu rumah tangga.

Penyerapan tenaga kerja adalah banyaknya lapangan kerja yang sudah terisi tercermin dari banyaknya jumlah penduduk yang bekerja Koncoro (dalam Afiat, 2017). Terserapnya penduduk bekerja terjadi karena adanya permintaan atas tenaga kerja. Permintaan atas tenaga kerja dapat diartikan sebagai kesempatan kerja (Simanjuntak dalam Kairupan, 2013). Menurut Tambunan (dalam Afiat, 2017) kesempatan kerja adalah jumlah orang yang dapat bekerja di suatu perusahaan yang

menampung tenaga kerja sesuai dengan lapangan kerja yang dibutuhkan atau tersedia. Di dalamnya terdapat kesediaan dan kesanggupan pekerja untuk memperoleh pekerjaan.

Kesempatan kerja memiliki hubungan erat dengan permintaan tenaga kerja. Dimana semakin tinggi permintaan atas tenaga kerja maka akan semakin tinggi juga kesempatan kerjanya, begitu juga sebaliknya, semakin rendah permintaan atas tenaga kerja maka semakin rendah pula kesempatan kerja yang ada. Keduanya harus seimbang sehingga nantinya tidak terjadi pengangguran. Masalah kesempatan kerja dan pengangguran merupakan masalah yang sulit dihindari, oleh suatu negara dan dapat menimbulkan masalah sosial lain seperti tindak kriminalitas dan masalah ekonomi. Kondisi tersebut akhirnya akan menyebabkan menurunnya tingkat kesejahteraan dan daya beli masyarakat. Semakin rendah tingkat pengangguran maka akan semakin sejahtera kehidupan masyarakat dan sebaliknya. Itu juga yang menyebabkan bahwa kesempatan kerja memiliki partisipasi dalam pembangunan, baik dalam arti menanggung beban pembangunan ataupun tanggung jawab atas pelaksanaan pembangunan itu sendiri (Sudarsono dalam Tussa'diah, 2019).

Kesempatan kerja adalah suatu keadaan yang menggambarkan ketersediaan lapangan kerja yang sudah diisi oleh para pencari kerja, namun diartikan juga sebagai permintaan atas tenaga kerja (Sadono dalam Hardini & Soesatyo, 2017). Kebutuhan tenaga kerja tersebut kemudian secara nyata diperlukan oleh perusahaan atau lembaga penerima kerja pada tingkat upah, posisi, dan syarat kerja tertentu, yang diinformasikan melalui periklanan dan lain-lain, yang kemudian dinamakan

sebagai lowongan pekerjaan. Indikator kesempatan kerja adalah banyaknya orang yang tertampung untuk bekerja pada suatu lapangan pekerjaan dan banyaknya lapangan pekerjaan yang tersedia.

2.1.3 Public goods

Terdapat perbedaan konsep antara *public goods* dengan *private goods*. *Public goods* atau dapat disebut juga barang publik adalah barang yang penggunaannya secara kolektif dapat digunakan oleh masyarakat seperti jalan dan penerangannya, informasi cuaca, keamanan oleh aparat kepolisian, dan lain sebagainya. *Public goods* memiliki dua ciri yaitu *non rival* (tidak akan habis) dan *inexhaustible* (penggunaannya tidak dapat dicegah selama *public goods* itu tersedia). Sedangkan, *private goods* atau yang disebut juga sebagai barang swasta atau barang pribadi adalah barang yang akan habis jika dikonsumsi. Memiliki dua ciri sebaliknya yaitu *rival* (akan habis) dan *exhaustible* (penggunaannya terbatas hanya untuk yang punya akses atas itu). *Public goods* memiliki dua karakteristik berdasarkan penggunaannya yaitu sebagai berikut:

1. *Non-rivaly*

Penggunaan suatu barang oleh satu konsumen tidak akan mengurangi kesempatan konsumen lain untuk mengkonsumsi barang tersebut. Setiap orang dapat mengambil manfaat dari penggunaan barang tersebut tanpa mengurangi manfaat yang akan diterima juga oleh orang lain. Contoh: Jalan raya, udara bersih, sinar matahari, dan lain-lainnya.

2. *Non-excludable*

Penggunaan terhadap *public goods* tidak dapat dihalangi, siapapun dapat mengambil manfaat dari barang tersebut. Contoh: Sebagian masyarakat membayar pajak yang nantinya digunakan untuk membiayai penggunaan jasa kepolisian, penggunaan jasa kepolisian itu tidak terikat bagi orang yang membayar pajak saja mereka yang tidak membayar pajak pun dapat mengambil manfaat atas jasa kepolisian tersebut.

Jalan dan udara merupakan salah satu contoh dari barang publik, karena sebagian besar pengguna jalan tidak akan mengurangi manfaat pengguna jalan yang lain, semua orang dapat menikmati manfaat dari jalan raya itu sendiri. Begitupun dengan udara, secara umum udara merupakan *public goods* karena tidak mungkin mencegah seseorang untuk menghirup udara. Barang-barang yang seperti itu disebut juga sebagai *public goods* murni.

Menurut Rahutami (2010) Infrastruktur adalah salah satu bentuk dari *public goods* yang dalam pembuatannya membutuhkan skema pembiayaan sehingga dapat memaksimalkan kesejahteraan dan mengurangi terjadinya *free rider* dan eksternalitas. Infrastruktur diartikan sebagai saran dan prasana umum. Sarana umum diartikan sebagai fasilitas publik meliputi jalan, rumah sakit, jembatan, air, telepon, tenaga listrik, dan lain-lain (Awandari & Indrajaya, 2016). Ketersediaan infrastruktur mempermudah kehidupan masyarakat baik dalam segi ekonomi dan segi sosial. Dalam segi ekonomi, infrastruktur dapat membantu penyerapan tenaga kerja, mempermudah seseorang untuk mencapai suatu tempat guna untuk mencari pekerjaan, dan sebagai penarik para investor untuk melakukan investasi yang

akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Sedangkan, dalam segi sosial, infrastruktur dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Public goods berupa jalan dapat diibaratkan sebagai lokomotif penggerak pembangunan ekonomi. Keberadaan jalan yang baik akan membuat aliran barang dari sentra produksi kepada konsumen berjalan dengan lancar. Kondisi ini memungkinkan harga barang dan jasa akan lebih murah sehingga dapat mudah terjangkau oleh seluruh rakyat Indonesia bahkan yang berpenghasilan rendah pun. Menurut Todaro dan Smith (dalam Tussa'diah, 2019) peningkatan yang terjadi dalam kualitas dan kuantitas jalan dapat meningkatkan daya tarik investasi. Peningkatan investasi ini akan berdampak pada meningkatnya pembangunan yang berdampak pada penyerapan tenaga kerja saat dan setelah pembangunan. Selain itu, Menurut Kurniawan (2014) jalan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan, kondisi permukaan jalan sangat signifikan berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan di suatu wilayah.

Menurut Mangkoesoebroto (dalam Tussa'diah pada "Ekonomi Publik" ,2019) mengatakan bahwa infrastruktur juga dikenal dengan istilah *public goods* dan mempunyai teori yaitu sebagai berikut:

1. Teori Pigou

Pigou berpendapat bahwa *public goods* harus disediakan sampai dimana tingkat kepuasan marginal sama dengan ketidakpuasan marginal akan pajak yang diambil untuk membiayai pemerintah untuk menyediakan barang publik. Kelemahan dari teori ini terletak dari kepuasan dan ketidakpuasan yang tidak bisa diukur secara kuantitatif karena bersifat ordinal.

1. Teori Bowen

Bowen mendefinisikan *public goods* adalah sebagai barang dimana tidak terdapat pengecualian. Jika suatu barang public sudah tersedia maka tidak ada satu orangpun yang dapat dikecualikan dari manfaat barang tersebut. Kelemahan dari teori ini adalah konsep awal bowen yang menggunakan permintaan dan penawaran dimana dalam *public goods* tidak ada prinsip pengecualian sehingga masyarakat tidak mau mengemukakan kesenangan mereka akan barang tersebut sehingga kurva permintaan menjadi tidak ada.

2. Teori Samuelson

Samuelson mengatakan bahwa adanya barang yang mempunyai karakteristik *non exclusionary* dan *non-rivaly* tidak berarti bahwa perekonomian tidak dapat mencapai kondisi Pareto Optimal atau tingkat kesejahteraan masyarakat yang optimal.

2.1.4 Investasi

Kata investasi dapat disebut juga sebagai kegiatan penanaman modal atau pembentukan modal. Investasi diartikan sebagai pengeluaran untuk keperluan penanaman modal atau kegiatan suatu perusahaan untuk membeli barang-barang modal atau perlengkapan produksi guna menambah kemampuan produksi barang dan jasa (Awandari & Indrajaya, 2016). Dalam pembangunan ekonomi memerlukan dukungan investasi yang merupakan salah satu sumber utama pertumbuhan ekonomi. Penanaman modal nantinya akan menghasilkan investasi yang akan terus menambah stok modal (*capital stock*). Selanjutnya, peningkatan stok modal tersebut akan meningkatkan produktivitas, kapasitas, dan kualitas

produksi sehingga pada akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja (Sulistiawati, 2012).

Menurut Todaro (dalam Sulistiawati, 2012) investasi memainkan peran penting dalam menggerakkan kehidupan ekonomi bangsa, karena pembentukan modal memperbesar kapasitas produksi, menaikkan pendapatan nasional maupun menciptakan lapangan kerja baru, dalam hal ini akan semakin memperluas kesempatan kerja. Jhingan (2013: 47) mengatakan bahwa pembentukan modal merupakan faktor yang paling penting dalam proses pembangunan ekonomi. Proses ini dibedakan menjadi tiga tingkatan: (i) kenaikan volume tabungan yang nyata tergantung pada kemauan dan kemampuan untuk menabung; (ii) keberadaan Lembaga kredit dan keuangan untuk menggalakkan dan menyalurkan tabungan agar dapat dialihkan menjadi dana yang dapat diinvestasikan; dan (iii) penggunaan tabungan untuk tujuan investasi dalam barang-barang modal dalam perusahaan. Pembentukan modal juga dapat diartikan sebagai pembentukan keahlian karena keahlian kerap kali berkembang sebagai akibat dari pembentukan modal. Peningkatan PMTB dapat dilakukan melalui pengalokasian anggaran negara untuk pengadaan barang modal termasuk infrastruktur fisik yang dapat mendorong perekonomian masyarakat (Amri & Aimon, 2017).

Dumairy (1996) mengatakan bahwa investasi dalam konteks permintaan agregat dikenal dengan Pembentukan Modal Domestik Bruto (PMDB). Perkembangan investasi berdasarkan gugus data dibedakan menjadi tiga, (i) kontribusi pembentukan modal domestik bruto dalam permintaan agregat dimana $Y = C + I + G + (X-M)$ dimana I merupakan keseluruhan investasi bruto yang

berasal dari penanaman modal dari dalam dan luar negeri baik yang dilakukan oleh swasta atau pemerintah; (ii) mengamati data Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA), konsentrasi kepada investasi yang dilakukan oleh kalangan swasta, dan (iii) menganalisis perkembangan investasi yang disalurkan oleh dunia perbankan.

PMDB memiliki data yang terdiri dari dua unsur yaitu pembentukan modal tetap domestik bruto dan perubahan stok. PMDB itu sendiri mencakup pengadaan, pembuatan atau pembelian barang modal baru dari dalam negeri, dan barang modal baru atau bekas dari luar negeri. PMDB dibedakan atas (i) pembentukan modal tetap berupa bangunan atau konstruksi yang nilainya berasal dari nilai bahan bangunan atau konstruksi, ongkos angkut, margin perdagangan, dan biaya lain (jasa serta biaya primer dan (ii) pembentukan modal tetap bruto berupa mesin atau alat perlengkapan yang nilainya berasal dari penjumlahan nilai mesin atau alat yang bersangkutan, ongkos angkut, margin perdagangan, dan biaya lain-lain. (Dumairy, 1996).

United Nations (PBB) pada buku panduannya mengatakan bahwa penyusunan neraca nasional yang disebut *System of National Account* (SNA) besarnya investasi yang direalisasikan di suatu wilayah atau negara pada satu tahun tertentu sama dengan jumlah PMTB yang ditambahkan dengan perubahan inventori atau stok. PMTB digambarkan dengan investasi fisik domestik yang sudah direalisasikan pada tahun tertentu dalam berbagai bentuk barang kapital, seperti: bangunan, mesin, alat transportasi, dan barang modal lain. Sedangkan inventori atau stok meliputi output setengah jadi atau input yang belum digunakan, termasuk

barang jadi yang belum dijual, inventori atau stok termasuk dalam investasi kerja yang merupakan bagian investasi yang direncanakan (Hermawan, 2017).

Menurut teori investasi yang dikemukakan oleh Harrod-Domar, pembentukan modal atau investasi merupakan faktor penting dalam menentukan pertumbuhan ekonomi (Awandari & Indrajaya, 2016). Kegiatan investasi yang dilakukan baik besar atau kecil pada akhirnya akan memiliki keterkaitan yang erat dengan kesempatan kerja dalam masyarakat. Menurut Sucitawati (dalam Budiarto & Dewi, 2015) mengatakan bahwa investasi akan meningkatkan kegiatan produksi sehingga akan membuka kesempatan kerja baru.

2.1.5 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi dalam tingkat nasional diukur dengan menggunakan Produk Domestik Bruto (PDB, bahasa Inggris: *Gross Domestic Product/GDP*) sedangkan dalam tingkat provinsi menggunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat dalam jangka panjang (Untoro, dalam Syahputra 2017). Simon Kuznet (dalam Jhingan pada "Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan", (2013) mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu negara untuk menyediakan semakin banyak jenis barang-barang ekonomi pada penduduknya. Kemampuan tumbuh ini sesuai dengan kemajuan teknologi, penyesuaian kelembagaan, dan ideologis yang diperlukan.

Kenaikan data pendapatan nasional digunakan sebagai ukuran untuk mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi disuatu negara. Pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu tujuan dari pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi memiliki hubungan yang erat, dengan adanya pembangunan ekonomi akan mendorong pertumbuhan ekonomi, sebaliknya pertumbuhan ekonomi akan memperlancar proses pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi setidaknya menimbulkan dua efek penting yaitu kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat yang meningkat dan terciptanya kesempatan kerja yang baru seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk (Jhingan, 2013).

Syahputra (2017) mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi selalu berkaitan dengan proses peningkatan produksi barang dan jasa dalam perekonomian masyarakat, yang nantinya akan diukur dengan meningkatnya hasil produksi dan pendapatan. Dalam ini berarti terdapat kenaikan dalam pendapatan nasional yang ditunjukkan oleh besarnya nilai Produk Domestik Bruto (PDB). Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai tambahan output yang bertambah besar dari tahun ke tahun atau dapat juga diartikan sebagai tingkat kenaikan PDB rill atau PNB rill pada suatu tahun tertentu apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya (Jhingan, 2013).

$$\text{Pertumbuhan Ekonomi} = \frac{PDB_t - PDB_{t-1}}{PDB_{t-1}} \times 100\%$$

2.1.5.1 Teori Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Sukirno (2015) pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa

yang diproduksi dalam masyarakat bertambah. Salah satu teori pertumbuhan ekonomi tertua sejak abad 16 sampai dengan akhir abad 17. Teori ini dipelopori oleh Adam Smith, David Ricardo, Malthus, dan JohnStuart Mill. Adam smith dalam bukunya *An Inquiry into Nature and Causes of the Wealth Nations* atau *The Wealth of Nature* (1776) yang di dalamnya terdapat analisis mengenai sebab-sebab dari berlakunya pertumbuhan ekonomi dan faktor yang mempengaruhinya (Sukirno, 2015:432-437).

1. Teori Klasik

Teori ini dipelopori oleh Adam Smith, David Ricardo, Malthus, dan JohnStuart Mill. Menurut para ahli ekonomi klasik terdapat 4 faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yaitu: jumlah penduduk, jumlah stok barang-barang modal, luas tanah, dan kekayaan, serta tingkat teknologi yang digunakan. Menurut teori klasik Adam Smith, pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh dua faktor utama yaitu penambahan penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi. Keterkaitan antara penambahan penduduk dengan pertumbuhan ekonomi ini disebut sebagai teori penduduk optimum. Teori klasik ini menetapkan asumsi luas tanah dan teknologi tidak mengalami perubahan. Pada mulanya penambahan penduduk akan meningkatkan pendapatan perkapita. Namun jika penambahan penduduk semakin banyak hukum hasil tambah akan semakin berkurang dan mempengaruhi fungsi produksi, yaitu produksi marginal akan mengalami penurunan dan akan membawa pada keadaan pendapatan perkapita sama dengan produksi marginal.

2. Teori Pertumbuhan Neo Klasik

Berbeda dengan teori klasik, teori neo klasik melihat pertumbuhan ekonomi dari segi penawaran. Ahli ekonomi yang mengembangkan teori pertumbuhan neo klasik ini adalah Robert Solow, Edmud Phelps, Harry Johnson, dan J.E Meade. Analisa pertumbuhan ekonomi dalam teori neo klasik tergantung pada perkembangan faktor-faktor produksi yang dapat dinyatakan sebagai berikut:

$$\Delta Y = f(\Delta K, \Delta L, \Delta T)$$

Dimana:

ΔY = tingkat pertumbuhan ekonomi

ΔK = tingkat pertumbuhan modal

ΔL = tingkat pertumbuhan penduduk

ΔT = tingkat perkembangan teknologi

Faktor terpenting dalam teori pertumbuhan neo klasik adalah kemajuan teknologi, penambahan, dan penawaran faktor-faktor produksi sebab perekonomian akan tetap mengalami tingkat kesempatan kerja dan kapasitas alat-alat modal akan digunakan sepenuhnya dari waktu-waktu.

3. Teori Schumpeter

Teori ini menekankan pada pentingnya peran pengusaha dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi. Hal itu dikarenakan pengusaha merupakan golongan yang akan terus menerus membuat inovasi dalam kegiatan ekonomi. Inovasi ini meliputi barang baru, meningkatkan efisiensi cara memproduksi dalam menghasilkan suatu barang, memperluas pasar sesuatu barang yang baru, mengembangkan sumber bahan mentah baru, dan mengadakan perubahan-

perubahan dalam organisasi. Kemajuan teknologi sangat ditentukan oleh jiwa usaha (*entrepreneurship*) dalam masyarakat yang mampu melihat peluang dan berani dalam mengambil risiko dalam membuka usaha baru atau memperluas usaha yang sudah ada.

4. Teori Harrod-Domar

Teori pertumbuhan Harrod-Domar bertujuan untuk menerangkan syarat yang harus dipenuhi supaya suatu perekonomian dapat mencapai pertumbuhan yang teguh atau *steady growth* dalam jangka panjang. Menurut Harrod-Domar, setiap perekonomian pada dasarnya harus menabung atau mencadangkan sebagai dari pendapatan nasionalnya untuk menambah atau menggantikan barang modal. Untuk memacu proses pertumbuhan ekonomi dibutuhkan investasi baru yang merupakan tambahan netto terhadap cadangan atau stok modal (*capital stock*) (Syahputra, 2017). Investasi harus terus mengalami kenaikan agar perekonomian mengalami pertumbuhan yang berkepanjangan. Pertambahan investasi tersebut diperlukan untuk meningkatkan pengeluaran agregat. Teori ini juga dikenal dengan teori pelengkap dari teori pertumbuhan Keynesian yang hanya memperhatikan perekonomian jangka pendek. Melalui analisis Harrod-Domar dapat dilihat bahwa dalam jangka panjang pertambahan pengeluaran agregat yang berkepanjangan perlu dicapai untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang teguh atau *steady growth* tercapai apabila $I + G + (X - M)$ bertambah terus menerus dengan tingkat yang menggalakkan.

2.1.5.2 Pendekatan Perhitungan Pertumbuhan Ekonomi

Produk Domestik Bruto (PDB) adalah alat ukur pertumbuhan ekonomi yang sering digunakan. Produk Domestik Bruto yang selanjutnya dikenal dengan PDB adalah nilai barang-barang dan jasa-jasa yang diproduksi dalam negara tersebut dalam satu tahun tertentu (Sukirno, 2015). PDB dibedakan menjadi dua yaitu PDB Atas Dasar Harga Berlaku (PDB ADHB) dan PDB Atas Dasar Harga Konstan (PDB ADHK). PDB ADHB adalah nilai barang dan jasa yang yang dihasilkan suatu negara dalam suatu tahun dan dinilai dengan mengikutsertakan unsur inflasi didalamnya. Sedangkan, PDB ADHK adalah nilai barang dan jasa yang dihasilkan suatu negara dalam suatu tahun dan dinilai tanpa mengikutsertakan unsur inflasi didalamnya.

Pendapatan nasional menurut harga berlaku tidak memberikan gambaran tentang pertumbuhan ekonomi sebenarnya hal tersebut dikarenakan adanya efek kenaikan harga (inflasi) yang belum diperhitungkan. Sukirno (2015) mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi dan penambahan kemakmuran ditentukan oleh perkembangan pendapatan nasional yang sebenarnya.

PDB dapat dihitung dengan dua pendekatan, yaitu pendekatan pengeluaran dan pendekatan pendapatan. Rumus PDB dengan pendekatan pengeluaran sebagai berikut:

$$\text{PDB} = \text{C} + \text{I} + \text{G} + (\text{X}-\text{M})$$

Keterangan:

C = Konsumsi Rumah Tangga

G = Konsumsi Pemerintah

I = Investasi

X = Ekspor

M = Impor

PDB dengan pendekatan pendapatan dihitung berdasarkan pendapatan yang diterima oleh faktor-faktor produksi. Adapun rumus PDB dengan pendekatan pendapatan sebagai berikut:

$$\text{PDB} = r + w + i + p$$

Keterangan:

r = Tingkat Sewa

w = Upah

i = Tingkat bunga

p = laba

2.1.6 Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang digunakan sebagai acuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

(1) No	(2) Judul dan Peneliti	(3) Perbedaan	(4) Persamaan	(5) Hasil Penelitian
1	Pengaruh Infrastruktur, Investasi, dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Melalui Kesempatan Kerja (Luh Putu Putri Awandari, I Gst Bgs Indrajaya, 2016)	Infrastuktur dengan menggunakan variabel air bersih, Investasi menggunakan variabel realiasi PMA	Pertumbuhan Ekonomi, Kesempatan Kerja, dan Kesejahteraan Masyarakat	Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1. Infastuktur, investasi, dan pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kesempatan kerja di Provinsi bali 2. Infrastuktur, pertumbuhan

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				<p>ekonomi, dan kesempatan kerja memiliki pengaruh langsung dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di Provinsi Bali</p> <p>3. Infrastruktur dan investasi memiliki pengaruh tidak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat melalui kesempatan kerja di Provinsi Bali.</p>
2	Analisis Investasi serta Pengaruhnya Terhadap Kesempatan Kerja dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia (Muhammad Rizki, Haryadi, 2021)	Metode yang digunakan adalah metode analisi deskriptif dan kuantitatif. Dimana peneliti hanya membandingkan semua data dari variabelnya dan hanya menghitung pengaruh secara parsial ke masing-masing variabel	Investasi, Kesempatan Kerja, dan Pertumbuhan Ekonomi	<p>Hasil penelitian tersebut menunjukkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Investasi berpengaruh signifikan terhadap kesempatan kerja dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia 2. Investasi, pertumbuhan ekonomi, dan kesempatan kerja mengalami perkembangan uang fluktuatif.
3	Pengaruh Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Penyerapan Tenaga Kerja Serta Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi Indonesia (Rini Sulistiawai, 2012)	Penyerapan Tenaga Kerja	Investasi, Pertumbuhan Ekonomi, dan Kesejahteraan Masyarakat	<p>Dengan menggunakan metode analisis jalur dengan tingkat signifikansi sebesar 0,05 diperoleh hasil sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Investasi memiliki berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi di Indonesia 2. Investasi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				<p>kerja Provinsi di Indonesia</p> <p>3. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif tidak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja dan Kesejahteraan Masyarakat Provinsi di Indonesia</p> <p>4. Penyerapan tenaga kerja berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.</p>
4	Pengaruh Belanja Daerah dan Investasi Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pertumbuhan Ekonomi Pada Kabupaten/Kota Provinsi Bali (I Putu Krismajaya, Ni Putu Martini Dewi, 2019)	Belanja Daerah	Investasi, Kesejahteraan Masyarakat, dan Pertumbuhan Ekonomi	<p>Dengan menggunakan teknik analisis hasil penelitian sebagai berikut:</p> <p>1. Belanja daerah memiliki pengaruh positif dan signifikan secara langsung terhadap pertumbuhan ekonomi</p> <p>2. Belanja daerah berpengaruh negatif dan signifikan secara langsung terhadap kesejahteraan masyarakat</p> <p>3. Belanja daerah memiliki pengaruh tidak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi</p>
5	Pengaruh Belanja Modal dan Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Melalui Kesempatan Kerja di Provinsi Jambi (Wahyu	Belanja Modal	Investasi, Pertumbuhan Ekonomi, dan Kesempatan Kerja.	<p>Berdasarkan hasil analisis yang sudah dilakukan diperoleh hasil bahwa:</p> <p>1. Belanja modal dan Investasi secara</p>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Zamzami, Junaidi, dan Purwaka Hari Prihanto, 2020)			<p>simultan berpengaruh signifikan terhadap peluang kerja di Provinsi Jambi tahun 2000-2018</p> <p>2. Belanja modal, investasi, dan Kesempatan Kerja berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.</p> <p>3. Investasi memiliki pengaruh tidak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi melalui kesempatan kerja</p> <p>4. Investasi berpengaruh signifikan terhadap kesempatan kerja di Provinsi Jambi Tahun 2000-2018</p> <p>5. Investasi dan Kesempatan kerja berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi tahun 2000-2018.</p>
6	Analisis Pengaruh Investasi Pemerintah dan Swasta Terhadap Penciptaan Kesempatan Kerja di Sumatera Utara (Lailan Safina, Sri Endang Rahayu, 2011)	Metode analisis Regresi Linier Berganda dan investasi yang menggunakan variabel PMDN dan PMA	Kesejahteraan masyarakat	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa:</p> <p>1. Investasi pemerintah berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat</p> <p>2. Investasi swasta berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat</p>
7	Pengaruh Investasi dan Tenaga kerja serta Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan	Pengeluaran pemerintah	Investasi Tenaga kerja Pertumbuhan ekonomi	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa:</p> <p>1. Tenaga kerja berpengaruh</p>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Ekonomi Serta Kesempatan Kerja (Hellen, Sri Mintarti, dan Fitriadi, 2017)		Kesempatan kerja	<p>signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi</p> <p>2. Investasi, tenaga kerja, dan belanja pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap kesempatan kerja</p> <p>3. Investasi, tenaga kerja, belanja pemerintah memiliki pengaruh tidak langsung terhadap kesempatan kerja melalui pertumbuhan ekonomi</p>
8	Kausalitas Infrastruktur Jalan, Urbanisasi, dan Kesejahteraan Masyarakat di Indonesia (Dini Dwi Syafina, Mike Triani, 2021)	Urbanisasi	Infrastuktur jalan Kesejahteraan masyarakat	<p>Dengan menggunakan metode VECM (Vector Error Correction Model) melalui analisis kausalitas granger, Impulse Response Function (IRF) dan Forecast Error Variance Decomposition (FEVD) diperoleh hasil sebagai berikut:</p> <p>1. Dalam jangka pendek Infrastruktur jalan berpengaruh tidak signifikan terhadap urbanisasi dan kesejahteraan masyarakat.</p> <p>2. Dalam jangka Panjang Infrastruktur jalan berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat dan urbanisasi</p> <p>3. Terdapat hubungan searah antara infrastuktur jalan dan urbanisasi terhadap kesejahteraan</p>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				masyarakat, artinya jika terjadi peningkatan pada infrastuktur jalan dan urbanisasi maka kesejahteraan masyarakat pun akan meningkat.
9	Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Disparitas Pendapatan Antardaerah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi Bali (I Komang Oka Artana Yasa, Sudarsana Arka, 2015)	Disparitas Pendapatan	Pertumbuhan ekonomi Kesejahteraan masyarakat	<p>Dengan menggunakan analisis Indeks Williamson dan analisis jalur maka diperoleh hasil penelitian sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terjadi penurunan tingkat disparitas di provinsi bali 2. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap disparitas pendapatan antardaerah 3. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat 4. Disparitas pendapatan daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat 5. Pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh tidak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat melalui disparitas pendapatan antardaerah.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
10	Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Keluarga Bukan Pegawai Negeri Sipil di Surabaya (Facrudy Asj'ari, 2015)	Data yang digunakan primer	Pertumbuhan ekonomi Kesejahteraan masyarakat	Hasil penelitian mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat keluarga bukan pegawai negeri sipil di Surabaya dan terdapat pengaruh variabel lain yang lain dalam penelitian ini.
11.	Infrastuktur Jalan dan Kesempatan kerja di Indonesia: Pendekatan <i>Vector Autoregressive</i> (Khairul Amri, 2020)	Metode yang digunakan yaitu dengan <i>Vector Autoregressive</i>	Infrastuktur jalan dan Kesempatan Kerja	Hasil penelitian mengatakan bahwa infrastuktur jalan tidak secara signifikan mempengaruhi kesempatan kerja
12.	Pengaruh Upah Minimum dan Investasi Terhadap Kesempatan Kerja di Provinsi Sulawesi Selatan (Samuel Randy Tapparan, 2017)	Upah Minimum	Investasi dan Kesempatan Kerja	Hasil penelitian mengatakan bahwa upah minimum dan investasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kesempatan kerja dan variabel pertumbuhan ekonomi tidak mampu memediasi pengaruh antara upah minimum dan investasi terhadap kesempatan kerja.
13.	Pengaruh Kemiskinan dan Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat (AA Gede Krisna Pratama dan Ida Bagus Darsana, 2019)	Kemiskinan	Investasi, Pertumbuhan ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat	Hasil penelitian mengatakan bahwa kemiskinan tidak memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat serta investasi berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Hubungan *public goods* terhadap kesejahteraan masyarakat melalui kesempatan kerja

Public goods atau yang dikenal juga sebagai barang publik yang didalamnya terdapat infrastruktur merupakan salah satu pendorong para investor untuk melakukan investasi. Infrastruktur jalan merupakan salah satu hal yang penting karena keberadaanya akan memudahkan proses mobilitas barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat. Infrastruktur jalan pun menjadi penentu investor untuk melakukan atau memperpanjang investasinya. Infrastruktur yang memadai sangat penting karena mencerminkan proses produksi dalam perekonomian. Semakin tinggi output perkapita yang dihasilkan, semakin tinggi pula produktivitas ekonominya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penyediaan infrastruktur sangat berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Fedderke dan Bogetic (dalam Meidiana & Marhaeni, 2019) mengatakan bahwa ketersediaan infrastruktur akan menunjang dalam kegiatan ekonomi, seperti peningkatan produktivitas yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan perkapita dari masyarakat dan memudahkan akses masyarakat terhadap sumberdaya sehingga produktivitasnya dan pada akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Terdapat keterkaitan antara infrastruktur dengan penyerapan tenaga kerja dan memiliki peran yang penting di suatu daerah untuk memperlancar kegiatan ekonomi. Infrastruktur jalan mempengaruhi kesejahteraan masyarakat dan kondisi permukaan jalan akan mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat di suatu

daerah (Kurniawan, 2014). Hal tersebut sejalan dengan penelitian Syafira & Triani (2021) yang mengatakan bahwa infrastruktur jalan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.

2.2.2 Hubungan investasi terhadap kesejahteraan masyarakat melalui kesempatan kerja

Pembentukan modal atau investasi menjadi faktor yang penting dan strategis dalam pembangunan ekonomi. Jhingan (2013) mengatakan bahwa penanaman modal merupakan kunci utama sebuah negara menuju pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi tidak akan tercapai jika penanaman modal yang dilakukan sia-sia. Teori Harrod-Domar mengatakan bahwa pembentukan modal tidak hanya dilihat sebagai pengeluaran yang akan menambah kemampuan suatu perekonomian untuk menghasilkan barang dan jasa, namun juga akan meningkatkan permintaan masyarakat.

Awandari & Indrajaya (2016) dalam penelitiannya investasi memiliki hubungan erat dengan pembentukan lapangan kerja baru, karena akan menyebabkan peningkatan kegiatan produksi sehingga masyarakat yang terserap dalam lapangan kerja yang baru itu memiliki pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sitompul (2017) mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap investasi dan penyerapan tenaga kerja. Hal tersebut berarti bahwa investasi yang tinggi akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan selanjutnya akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Dengan demikian tingkat pengangguran dapat direduksi, pendapatan masyarakat meningkat, dan kesejahteraan masyarakat pun mengalami kenaikan.

Penelitian lain oleh Sulistiawati (2012) mengatakan bahwa investasi memiliki pengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja di provinsi Indonesia dengan adanya investasi yang dilakukan maka akan membutuhkan tenaga kerja untuk merealisasikan investasi tersebut. Menurut Krismajaya & Dewi (2019) mengatakan bahwa investasi berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bali. Investasi yang dilakukan pemerintah melalui belanja langsung telah dapat meningkatkan kegiatan ekonomi yang dapat menyerap tenaga kerja sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Awandari & Indrajaya, 2016).

2.2.3 Hubungan pertumbuhan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat melalui kesempatan kerja

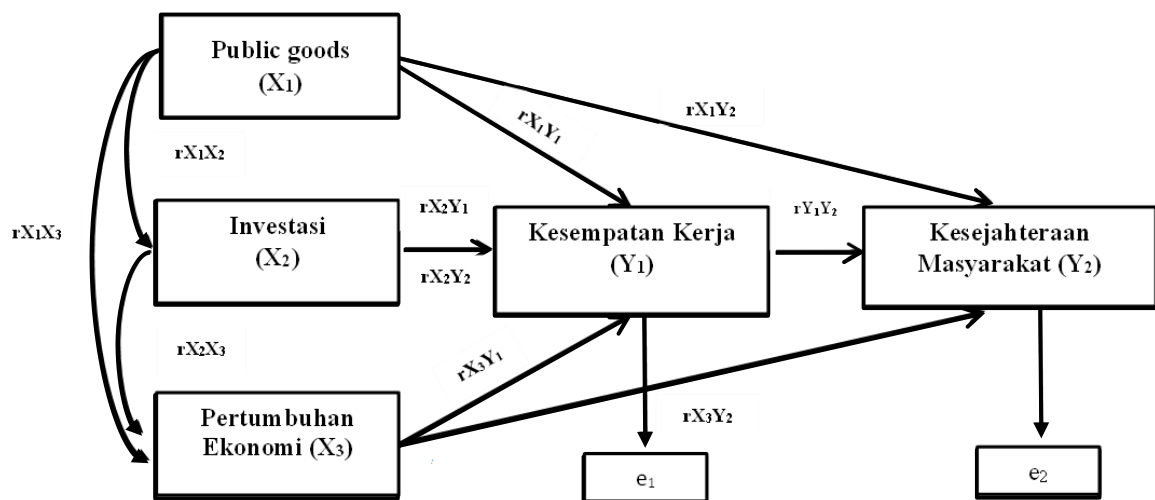
Pertumbuhan ekonomi dan menyerap tenaga kerja yang lebih banyak merupakan dampak dari pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi ditandai dengan kenaikan daya beli masyarakat terhadap barang atau jasa yang nantinya akan menyebabkan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, terbukanya kesempatan kerja ditandai dengan banyaknya orang yang bekerja dan mendapatkan pendapatan dari usaha sehingga nantinya dapat memenuhi kebutuhan hidup, terpenuhinya kebutuhan masyarakat menandakan penduduk mencapai kesejahteraannya.

Menurut Tarmidi (dalam Asj'ari, 2015) mengatakan bahwa tujuan lebih luas dari pembangunan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi, menghapus kemiskinan, meratakan pendapatan, menciptakan kesempatan kerja, meningkatkan pendidikan dan pelayanan Kesehatan, serta membebaskan individu dan negara dari

perbudakan dan ketergantungan. Asj'ari (2015) meneliti tentang Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kesejahteraan Keluarga Bukan Pegawai Negeri Sipil di Surabaya, hasil penelitiannya mengatakan bahwa terdapat pengaruh antara pertumbuhan ekonomi terhadap kesejahteraan keluarga bukan pegawai negeri sipil di Surabaya hal tersebut dikarenakan besarnya pertumbuhan ekonomi merupakan ukuran nilai pekerjaan pengusaha.

Yasa & Arka (2016) dalam penelitiannya mengatakan bahwa terdapat pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat di Provinsi bali. Penelitian lain oleh Awandari & Indrajaya (2016) mengatakan bahwa terdapat pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat melalui kesempatan kerja di Provinsi bali. Hal tersebut berarti kesempatan kerja berhasil memediasi atau memiliki pengaruh tidak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi kepada kesempatan kerja.

Berdasarkan hubungan teoritis yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka peneliti dapat menggambarkan kerangka pikir sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara dari suatu penelitian yang harus dipastikan kebenarannya. Berbeda dengan rumusan masalah, hipotesis dikemukakan dengan menggunakan kalimat pernyataan yang nantinya akan menjadi jawaban dengan didasari dengan fakta empiris dan data yang sudah dikumpulkan sebelumnya.

Berdasarkan identifikasi masalah dan kerangka pemikiran yang sudah dijelaskan sebelumnya, hipotesis atau dugaan sementara dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Diduga *public goods*, investasi, dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap kesempatan kerja di Indonesia Tahun 2007-2021
2. Diduga *public goods*, investasi, pertumbuhan ekonomi, dan kesempatan kerja berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat di Indonesia Tahun 2007-2021
3. Diduga *public goods*, investasi, dan pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh tidak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat melalui kesempatan kerja di Indonesia Tahun 2007-2021.